

BAB II

DINAMIKA DAN PROSES KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Pada bab II ini akan menjelaskan tentang dinamika politik luar negeri beserta aktor-aktor dominan pembuatan kebijakan Amerika Serikat. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776 Amerika Serikat melakukan berbagai perubahan pola kebijakan luar negerinya sampai saat ini. Negara pemegang hegemoni terbesar ini telah melalui banyak periode dalam menjalankan perannya dalam konstilasi internasional. Maka bab ini oleh penulis dibagi menjadi lima sub judul. Pertama, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari periode ke periode lainnya. Kedua, akan dijelaskan mengenai aktor-aktor dominan yang terlibat dalam pembuatan politik luar negeri Amerika Serikat. Ketiga, berisikan tentang kebijakan Amerika Serikat pada era perang dingin yang dibagi menjadi dua periode yaitu kebijakan pembendungan di Eropa dan kebijakan pembendungan di Asia. Selanjutnya pada subbab ke empat akan dibahas mengenai kebijakan Amerika Serikat pada era krisis nuklir Kuba. Kemudian pada subbab yang terakhir penulis membicarakan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Jong-Un.

A. Prinsip- Prinsip Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri Amerika Serikat telah mengalami berbagai perubahan dinamika. Hal tersebut merupakan bentuk penyesuain strategi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Seperti halnya negara-negara lain tindakan politik luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Sehingga dalam beberapa abad lamanya, negara ini melakukan sejumlah perubahan karakteristik atau prinsip kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konstelasi politik internasional. Faktor

domestik dan internasional erat kaitannya dengan alasan suatu negara melakukan perubahan pola kebijakan. Adapun prinsip kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibedakan menjadi lima periode, yaitu Ekspanisme, Isolationisme, Intervensionisme, Unilateralisme dan Moralisme –Realisme.

1. Ekspanisme

Dalam pertengahan abad 19 Amerika Serikat telah melakukan upaya perluasan. Atas dasar keyakinan *Manifest Destiny*, yaitu kepercayaan luas bahwa bangsa Amerika Serikat ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh benua amerika utara.¹² Takdir nyata mewujudkan keyakinan bahwa orang Amerika memiliki tujuan lebih tinggi untuk melayani dunia daripada yang lain.¹³ Hak privilege tersebut bermuatan khusus untuk melindungi nilai kebebasan.

Saat melakukan tindakan ekspansi, negara Amerika Serikat masih terdiri dari 13 wilayah negara bagian dimana harus menghadapi negara-negara imperialis Eropa yaitu Inggris, Prancis dan Spanyol. Penyebaran pada saat itu berhasil dilakukan karena didukung oleh kemampuan ekonomi dan pertahanan Amerika Serikat serta kepiawaian dalam berdiplomasi. Wilayah perluasan tersebut meliputi Louisiana, aneksasi Florida dan Texas, serta pembelian Alaska dari Rusia. Prinsip dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat kala itu merupakan implementasi dari konsep *Manifest Destiny*.

2. Isolasionisme

Karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat isolasionisme merupakan prinsip kebijakan menutup diri serta tidak terlibat dalam persoalan konstilasi politik dunia. Sikap ini ditunjukkan Amerika Serikat ketika dalam masa Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914 dibawah kepemimpinan presiden Woodrow Wilson

¹² Eugene R. Wittkopf, Christopher M. Jones and Charles W. Kegley. 2003. *American Foreign Policy Pattern and Process*. Belmont: Thomson Wadsworth, hal.8

¹³ *Ibid*

menegaskan Amerika Serikat akan tetap netral pada Perang Dunia dengan menghindari keikutsertaan dalam peperangan. Isolasionisme mengacu pada keenganan Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan aliansi dalam Perang Eropa.¹⁴ Masyarakat Amerika Serikat percaya untuk mewujudnya cita-cita kebebasan dan demokrasi dapat dilakukan melalui selain perang. Kebijakan isolasi ini erat kaitannya dengan upaya perlindungan kepentingan nasional Amerika Serikat. Pada periode Amerika Serikat lebih mengutamakan perlindungan kondisi ekonomi dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya prinsip ini juga menandai berakhirnya sikap terbuka Amerika Serikat terhadap masuknya para imigran. Tercatat sebelumnya Amerika Serikat menerima imigran sekitar 14,5 juta jiwa. Namun pasca berlakunya Undang-undang imigrasi tahun 1917, kurang dari 150.000 imigran baru diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat.¹⁵

3. Intervensionisme

Amerika Serikat telah mengembangkan prinsip isolasionisme selama perang dunia 1. Namun seiring perkembangan dunia, persebaran kekuatan fasisme dan komunisme mulai menjadi polemik bagi Amerika Serikat. Meskipun dalam masa isolasionisme tersebut Amerika Serikat sebenarnya telah melakukan intervensi sejak tahun 1890 di berbagai wilayah seperti Filipina, Siberia, Kuba, Nikaragua dan Puerto Rico.¹⁶

Tindakan invasi yang dilakukan oleh Jerman pada tahun 1939 terhadap Polandia menimbulkan

¹⁴ThoughtCo, *Evolusi Isolasionisme Amerika*, dikutip dari <https://www.thoughtco.com/the-evolution-of-american-isolationism-4123832> pada tanggal 2 Desember 2017

¹⁵ *United States History : Isolationism*. dikutip dari <http://www.u-s-history.com/pages/h1601.html>. diakses pada tanggal 3 Desember 2017

¹⁶ Nicholas Klar. 1993. " *The US from Isolation to intervention*," *Brighton: Klarbooks Academic*. hal 117

perlawanan dari Perancis dan Inggris. Kekalahan Perancis dalam menghadapi Jerman saat itu membuat Inggris menjadi harapan satu-satunya negara demokratis yang bisa membendung kekuatan Nazisme. Kondisi ini membuat pemerintah Amerika Serikat dalam kondisi dilematik antara tetap mempertahankan prinsip isolasionisme atau bergeser pada intervensionisme. Perlunya ikut campur Amerika dalam perang tersebut tidak terlepas dari bahaya persebaran paham nazisme yang membahayakan bagi prinsip nilai demokratis bangsa AS.

Sehingga pada era Perang Dunia kedua terjadi pergeseran karakteristik kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi intervensionisme melalui keikutsertaan dalam melawan kubu Sentral. Cara efektif untuk menyelamatkan kepentingan Amerika Serikat yaitu membantu negara-negara demokratis dalam segala hal. Melalui program Marshall Plan, Presiden Harry S. Truman memberikan kebijakan dana bantuan untuk memulihkan kembali kondisi benua Eropa yang porak poranda akibat perlawanan terhadap Nazi Jerman. Negara-negara yang mendapat bantuan pemulihan ini yaitu Prancis, Jerman Barat, Inggris, Yunani, Italia, Austria, Belgia, Luxemburg, Norwegia, Swedia, Islandia, Belanda, Swiss dan Turki.¹⁷

4. Unilateralisme

Unilateralisme merupakan prinsip kebijakan dimana negara bertindak sesuai dengan keputusan sendiri tanpa melibatkan legitimasi eksternal. Doktrin ini menjauhkan Amerika Serikat dari kerangka kerja multilateral yang memerlukan proses pertimbangan dan negosiasi dengan negara lain ataupun lembaga internasional. Hal ini ditengarai Amerika Serikat tidak ingin tunduk pada prinsip-prinsip yang bertentangan

¹⁷VOA Indonesia. "70 Tahun Program Pemulihan Eropa atau 'Marshall Plan'"
dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/marshall-plan-70-tahun-/3888530.html>.
Diakses pada 5 Desember 2017

dengan kepentingan nasional mereka. Negara ini mengklaim bahwa mereka sepenuhnya berdaulat, sehingga berhak menentukan sendiri apa yang akan dibuat oleh konstitusinya.

Sejak peristiwa September 2001, Amerika Serikat telah memilih aksi militer sepihak dalam peperangan melawan terorisme. Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush Amerika Serikat telah berniat untuk mempertahankan kekuatan militer dan hegemoni globalnya melalui strategi keamanan nasional menggunakan kebijakan *pre-emptive*.¹⁸ Setelah melancarkan agresi terhadap Afganistan sebagai tindakan balasan atas terorisme 9/11, bukti keagresifan unilateralisme Amerika Serikat yaitu ketika mengerahkan serangan militer terhadap Irak pada bulan Maret 2003. Dimana tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat beranggapan mereka sebagai pilar pendukung duniaketertiban, dimana menjadi satu-satunya penjamin perdamaian dan keamanan global.¹⁹ Terdapat dua alasan mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak, yakni terkait deteksi kepemilikan senjata pemusnah massal dan regim diktator Saddam Hussein yang jauh dari prinsip demokrasi. Namun sebenarnya kebijakan politik Amerika Serikat ini memiliki standar ganda. Terbukti negara Arab Saudi yang menerapkan sistim monarki sama sekali tidak pernah mendapat tekanan demokratisasi. Pemerintah Amerika Serikat malah bertindak melindungi kekuasaan non-demokrasi tersebut.

5. Moralisme

Prinsip moralisme erat kaitannya dengan moralitas bangsa Amerika Serikat sebagai pendorong

¹⁸Eugene R. Wittkopf, Christopher M. Jones and Charles W. Kegley, Op.cit ., hal.28

¹⁹David M. Malone and Yuen Foong Khong. 2003. Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International Perspectives. Boulder City. Lynne Rienner, hal 9

kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat harus kembali ke akar nilai-nilai negara, yakni terhadap Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat yang mana berisikan dokumen suci yang masih menuntun dan menentukan bangsa mereka sampai hari ini. Dalam deklarasi tersebut menuliskan kata-kata dari benak semua orang Amerika: "Kami memegang kebenaran ini untuk menjadi bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan, di antaranya adalah hidup, kebebasan pengejaran kebahagiaan.²⁰ Hal tersebut merupakan fondasi visi moral yang sejatinya digunakan Amerika Serikat untuk menyebarkan pesan demokrasi.

Terdapat defisit moral mengenai kebijakan Amerika Serikat dimasa presiden George W. Bush. Serangan terhadap Irak merupakan kekurangan kronis tentang nilai moral bangsa Amerika akan perdamaian. Dikarenakan dalam penyerangan sepihak tersebut menelan banyak korban masyarakat sipil. Sehingga karakteristik kebijakan moralisme ini identik dengan masa kepemimpinan Barack Obama. Sejak hari pertama memangku jabatan presiden, Obama menekankan pemerintahannya mengupayakan agar proses perdamaian digerakkan kembali. Seperti halnya menegaskan tuntutan nya kepada Israel dan Palestina agar menyepakati sebuah kompromi dan tidak menggunakan kekerasan.

B. Aktor - Aktor dalam Pembuatan Keputusan Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri negara dipastikan mengarah pada pencapaian kepentingan suatu negara. Namun memang politik luar negeri bersifat dinamis, politik luar negeri harus merespon

²⁰Studyres.com "Morality and US Foreign Policy", dikutip dari <http://www.cap.uni-muenchen.de/schlesinger.doc> . Diakses pada tanggal 8 Desember 2017

dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam dunia internasional. Menurut konstitusi Amerika Serikat, disebutkan bahwa presiden AS adalah panglima tertinggi. Pada artikel ke-1 bagian 8, sebagian tugas kongres berhubungan dengan masalah internasional, seperti perang dan urusan perdagangan internasional. Sedangkan dalam artikel ke-2 menyebutkan tentang pemberian kekuasaan eksekutif tertinggi terhadap presiden.²¹ Sehingga presiden dan kongres memiliki hubungan dengan kebijakan luar negeri. Namun presiden memiliki akses yang lebih besar karena membawahi departemen pertahanan, departemen luar negeri dan CIA. Secara struktural formal, berikut beberapa pihak yang terlibat dan memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yakni:

a. Presiden

Di bawah konstitusi, Presiden menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seorang presiden memiliki kewenangan dalam kebijakan luar negeri AS, mengarahkan perjanjian perang, traktat, dan hubungan diplomatik negara. Presiden merupakan panglima tertinggi di angkatan bersenjata, yakni membawahi Departemen Pertahanan yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Presiden memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian dengan suara dua-pertiga Senat dan memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian internasional.

b. Kongres

Merupakan cabang legislatif dari pemerintahan AS, memiliki kedudukan yang penting di mana kongres tidak hanya turut berandil pada pemerintahan dalam negeri namun juga politik luar negeri. Segala kebijakan yang akan diambil oleh presiden harus melalui ratifikasi oleh kongres. Peran Kongres dalam kebijakan luar negeri paling terlihat pada undang-undang pelarangan

²¹ Madeleine Albright.2000. "Foreign Policy Agenda: The Making of U.S Foreign Policy" dalam Journal of the U.S Department of State, Volume. 5, Nomor. 1

atau pembatasan kebebasan aksi presiden dalam hubungan luar negeri. Kemudian melalui *formal and informal advice*, kongres memberikan saran kepada cabang eksekutif melalui pertemuan antara presiden dan anggota kongres maupun melalui kontak informal. Kongres memiliki otoritas dalam politik luar negeri dan keamanan nasional. Seperti halnya pengiriman pasukan untuk perang oleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari pihak kongres terlebih dahulu. Presiden juga tidak bisa memberikan bantuan militer dan ekonomi tanpa persetujuan dari Kongres. Sehingga kongres berperan secara efisien melakukan pembatasan kewenangan atas presiden. Hal ini ditujukan untuk mengontrol setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pihak eksekutif.

c. Dewan Penasehat Keamanan

Merupakan forum utama yang digunakan presiden Amerika Serikat dalam hal pertimbangan keamanan nasional, masalah militer, dan masalah kebijakan luar negeri. Forum ini diketuai oleh Presiden, di mana para peserta regular adalah Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Dewan penasehat memiliki fungsi memberi saran dan membantu presiden dalam pembuatan kebijakan nasional dan luar negeri. Serta sebagai lengan utama presiden AS untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan di antara berbagai lembaga pemerintahan di mana Dewan Keamanan Nasional juga memiliki mitra dengan dewan keamanan nasional di banyak negara lain.

d. Departemen Luar Negeri

Menteri luar negeri sebagai kepala di Departemen Luar Negeri. Seorang Menteri Luar Negeri, ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala penasehat dalam urusan kebijakan luar negeri Presiden. Adapun wewenang Menteri Luar Negeri yakni melakukan negosiasi terkait dengan urusan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian

memberikan saran terhadap Presiden mengenai penerimaan, penarikan, dan pemberhentian perwakilan pemerintah asing. Jadi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri memiliki wewenang sebagai penasihat utama Presiden mengenai urusan internasional untuk dijadikan pertimbangan.

e. Departemen Pertahanan/ The Pentagon

Dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab dalam masalah angkatan bersenjata dan militer. Departemen ini memiliki tiga departemen bawahan yakni, Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Laut dan Departemen Angkatan Udara. Menteri Pertahanan memiliki tugas sebagai penasihat tertinggi terkait kebijakan pertahanan bagi Presiden Amerika Serikat, dengan menyusun kebijakan pertahanan secara umum dan segala kebijakan yang terkait dengan departemen pertahanan. Menteri Pertahanan dipilih oleh Presiden dengan persetujuan Senat dan Kabinet. The Pentagon bertindak sebagai organ utama dalam hal pengeluaran kebijakan militer. Menteri Pertahanan menempati urutan dalam rantai komando militer, tepat di bawah Presiden dan berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan pertahanan.

f. CIA(Central Intelligence Agency)

CIA dalam proses kebijakan luar negeri memiliki peran penting. Pertama, CIA bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, analisis intelegensi dan distribusi kepada pembuat kebijakan, terutama kepada Presiden, Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Pertahanan, walaupun beberapa tahun terakhir banyak departemen dan lembaga menggunakan jasa intelegensi ini. Kedua melakukan operasi rahasia di luar negeri untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Ada beberapa cara CIA dalam mengumpulkan informasi. Yakni menerjemahkan artikel surat kabar serta siaran

radio dan televisi. Selain itu menggunakan satelit yang mengambil gambar dari luar angkasa terhadap negara sasaran. Setelah itu data obyektif diberikan pada pihak eksekutif. Analisis CIA hanya memberikan informasi tidak memberikan rekomendasi kebijakan. Sehingga para pembuat kebijakan di Amerika Serikat menggunakan informasi yang disediakan CIA untuk membantu merumuskan kebijakan AS terhadap negara lain.

C. Kebijakan Amerika Serikat Era Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan block Sentral, tidak begitu saja mengahiri konflik di konstelasi dunia. Pecahnya persekutuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan awal mula munculnya Perang Dingin. Sebelum konflik ini naik kepermukaan, kedua negara ini merupakan aliansi yang tergabung dalam block Sekutu melawan kekuatan Fasisme. Persaingan penyebaran pengaruh dan hegemoni atas Eropa merupakan awal mula penyebab perang ini. Dimana didasari oleh perbedaan ideologi yang terlihat nyata antara Uni Soviet yang berezim sayap kiri radikal sedangkan AS sayap kanan liberalis.

Pada tahun 1945 pada masa akhir perang dengan Jerman, AS memiliki 3,5 juta tentara yang diorganisir menjadi 68 divisi di Eropa dengan 149 angkatan udara.²² Kemudian pada tahun 1946 terjadi pengurangan jumlah pasukan AS menjadi 400 ribu. Hal ini mendorong keteguhan Uni Soviet untuk berusaha memperluas pengaruhnya di Eropa. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menasehati kebijakan penarikan tentara AS tersebut karena menginginkan pasukan AS tetap tinggal dan bergabung dengan pasukan Inggris untuk menekan tentara merah Uni Soviet di Jerman Timur. Disadari melalui angkatan bersenjata AS yang kuat serta kekuatan industrinya yang luar biasa, dapat

²²John Spanier.1988.*American Foreign Policy since Word War II*,Washington D.C: Congressional Quarterly Press. Hal 30

digunakan sebagai alat *bargaining position* terhadap Eropa Timur.²³

Dukungan kekuatan militer AS diperlukan untuk menghalangi Stalin dalam usaha mencengkeram Eropa Timur ataupun percobaan memperluas kekuatan Soviet ke wilayah baru. Sejumlah kota penting yang terletak di sekitar lingkungan Uni Soviet yakni Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Buchares dan Sofia dibawah kontrol Stalin. Adapun keinginan Uni Soviet adalah memperluas kekuatan dan doktrin mereka tanpa batas dimana secara terang-terangan negara ini menyatakan sedang melakukan upaya ekspansionis. Kondisi ini menjadi penyebab pergeseran kebijakan AS yang mengakui bahwa Uni Soviet menjadi musuh yang nyata. Sehingga dibutuhkan peran AS dan sekutunya untuk menahan upaya negara Komunis tersebut.

Pada tahun 1947 Presiden Harry S. Truman memberikan pidato terpenting dalam sejarah Amerika berisikan tentang deklarasi Perang Dingin. Truman menyatakan bahwa dunia saat ini terpecah antara kekuatan kebebasan dan tirani, sehingga dibutuhkan kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung masyarakat bebas yang menolak usaha penundukan oleh kelompok minoritas bersenjata atau oleh tekanan dari luar. Di wilayah Yunani dan Turki menggambarkan perkembangan situasi yang kian memburuk. Melihat situasi di Yunani yang mulai krisis akan pengaruh Uni Soviet, membuat Truman meminta kepada kongres dana sebesar \$400 juta untuk memberikan bantuan ekonomi serta bantuan militer.²⁴

Saat itu Turki berhasil melawan tekanan Uni Soviet secara langsung. Namun berbeda dengan Yunani yang semakin berat menghadapi lawan karena keikutsertaan

²³*Bargaining Position*, posisi seseorang, kelompok, atau organisasi dalam negosiasi. Sehubungan dengan kemampuan mereka untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bargaining-position>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017

²⁴David A. Lake.1999. *Entangling Relation: American Foreign Policy in Its Century*. New Jersey:Princeton University Press. Hal.133

Yugoslavia dan Bulgaria membantu komunis dalam perang. Sehingga Truman meminta pemberian wewenang atas pengiriman personel tentara AS dalam rangka membantu rekonstruksi dan pelatihan di Yunani untuk melawan ancaman perluasan Uni Soviet. Kebijakan tersebut merupakan titik awal kebijakan pembendungan pemerintah Amerika Serikat. Dalam pengaplikasian doktrin Truman, berisikan poin penting AS untuk melakukan penekanan khusus terhadap ancaman jatuhnya negara-negara Eropa Timur ke lingkup rezim Uni Soviet. Persaingan penyebaran pengaruh tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan yang mengaktifkan perhatian Amerika Serikat untuk melakukan berbagai kebijakan pembendungan.

1. Kebijakan Pembendungan di Eropa

Bantuan terhadap Yunani dan Turki merupakan kebijakan pencegahan awal Amerika Serikat untuk melawan ekspansi Uni Soviet. Perang Dunia Kedua yang berpusat di Eropa telah menghancurkan ekonomi semua negara yang terlibat. Ketakutan Amerika Serikat yang paling dalam adalah bahwa Uni Soviet akan memanfaatkan kerentanan kondisi Eropa ini. Seperti krisis ekonomi yang dialami Inggris juga diikuti oleh terpuruknya perekonomian di negara-negara seluruh Eropa. Pasca perang negara Jerman mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa, jutaan orang menderita kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Melihat keadaan Eropa pada ambang kehancuran ekonomi, hal ini memaksakan Eropa harus mendapat bantuan dari luar. Sehingga ketidakmampuannya dalam menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi pembelian komoditas, membuat Eropa tergantung pada bantuan Amerika Serikat.

Tidak dapat dipungkiri bagi Amerika Serikat wilayah Eropa menjadi sangat penting untuk kepentingan mereka. Hal ini terkait persaingan hegemoni dunia bipolar yang sedang berkembang pada saat itu. Menanggapi situasi ini Amerika Serikat memberikan kebijakan program bantuan ekonomi

skala besar yakni Marshall Plan pada tahun 1947-1952. Program Marshall Plan diinisiasi oleh sekretaris Amerika Serikat bernama George Marshall dengan tujuan membangun kembali kekuatan ekonomi di negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Pemerintah AS telah mengeluarkan dana bantuan ekonomi Marshall Plan sebesar \$ 18,6.²⁵

Benua Eropa memiliki potensi kekuatan yang sangat besar, sehingga keamanan Eropa memang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Amerika Serikat. Pemerintahan Truman tidak akan membiarkan Eropa jatuh ke dalam pengaruh dan pengendalian Uni Soviet. Alasan ini menjadikan dasar Amerika harus membantu Eropa untuk pulih melalui kebijakan pemberian suntikan dolar secara masif. Hanya sebuah program bantuan besar yang diyakini pemerintah Amerika Serikat dapat mengembalikan pemulihan produksi pertanian dan industri layaknya sebelum perang, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi Eropa. Amerika Serikat memang berpengalaman dan menikmati keberadaan pasar domestik berskala besar tanpa hambatan dalam perdagangan internal sehingga percaya bahwa keuntungan yang sama dapat diperoleh untuk negara-negara Eropa. Dengan melalui produksi massal berbiaya rendah, pemulihan ekonomi Eropa bergantung pada penciptaan industri pasar massal yang diharapkan dapat membesar dan berkompeten.

Persyaratan kebijakan bantuan Amerika Serikat yakni pemerintahan Truman menyediakan dana sedangkan pihak Eropa harus mengambil inisiatif dan melakukan perencanaan. Program Marshall Plan ini menggelontorkan dana sebesar \$18,6 dimana Inggris, Perancis, dan Jerman Barat menerima lebih dari setengah dari jumlah tersebut. Terbukti Marshall Plan mengalami kesuksesan besar, produksi-produksi Eropa

²⁵Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkope. 1996. *American Foreign Policy*: New York. St. Martin's Press. Hal 137

sudah melebihi kondisi sebelum perang yakni meningkat sebesar 25 %, selang dua tahun kemudian angka ini meningkat lebih tinggi menjadi 200%.²⁶ Sebuah kebanggaan bagi Amerika Serikat mampu mewujudkan suksesi Kebijakan Luar Negerinya untuk memulihkan perekonomian Eropa sebagai cara menjauhkan negara-negara tersebut dari pengaruh Komunisme.

Pada bulan April 1949 Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Inggris Raya, Italia, Luxembourg, Belanda, Norway, Portugal dan Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pertama kalinya dalam sejarah negara-negara tersebut berkomitmen satu sama lain untuk dalam persekutuan keamanan. Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berisi:

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.²⁷

Bagi Amerika Serikat dengan ditandatangani persetujuan tersebut di Washington D.C, secara otomatis Eropa telah menjadi lini pertahanan pertama

²⁶*Opcit*, John Spanier 50

²⁷Wikiwand. "Pakta Pertahanan Atlantik Utara" dikutip dari http://www.wikiwand.com/id/Pakta_Pertahanan_Atlantik_Utara. Diakses pada 14 Desember 2017

mereka. Kebijakan ini selaras dengan keinginan Amerika Serikat yang akan berjuang untuk mempertahankan kebebasan eropa dan mencegah serangan Uni Soviet. Dimana semua anggota NATO akan bersama-sama melindungi keamanan wilayah dan negara mereka dari musuh potensial. Hal ini melibatkan tiga tugas NATO dalam pembentukan awal yakni: pembentukan struktur komando, perumusan strategi untuk mempertahankan eropa, dan pembangunan kembali kekuatan dasar. Upaya ini dimulai dengan pengangkatan Dwight Eisenhower secara umum untuk sebagai Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa. Namun tampaknya keberhasilan kebijakan luar negeri Amerika dalam memperkuat Eropa Barat membawa perubahan dalam tekanan Soviet dari Eropa ke Asia.

2. Kebijakan Pembendungan di Asia

Keberhasilan Amerika Serikat di Eropa diikuti oleh kecemasan kejatuhan Asia di tangan Uni Soviet. Runtuhnya China Nasionalis menyebabkan kesulitan Amerika Serikat untuk merangkul negara ini menjadi sekutunya. Kegagalan membangun hubungan dengan China terbentuk karena pemerintah China yang dikuasai oleh Partai Komunis lebih dekat menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Selama Perang Dunia II Amerika Serikat memiliki dua tujuan dalam pasifik yaitu mengalahkan Jepang dan menciptakan persekutuan dengan Cina yang kuat. Pergeseran Washington mengubah Jepang menjadi sekutu dalam upaya menciptakan keseimbangan kekuatan di Pasifik. Amerika Serikat berharap demokratisasi akan memainkan peran utama dalam merancang perdamaian pasca perang di wilayah Asia Timur jauh. Amerika Serikat mengambil beberapa tindakan untuk memberi andil pada China. Namun hal tersebut tidak terpenuhi karena posisi China pro-Amerika pemerintahan Nasionalist kalah dengan Komunis China.

Korea Utara menyerang Korea Selatan pada akhir Juni 1950, kejadian ini mengejutkan pemerintah Amerika Serikat. Agresi Korea Utara tersebut menurut pendapat AS tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan Uni Soviet. Sejatinya tujuan utama *containment* adalah mencegah perluasan Uni Soviet lebih lanjut, namun kelambanan Amerika dalam menghadapi agresi ini dapat mendorong tindakan agresi di masa depan. Sehingga sebuah keharusan bagi Amerika Serikat melindungi Korea Selatan. Saat itu tentara Korea Selatan tidak cukup persenjataan untuk melawan invasi. Sedangkan posisi tentara Amerika terdekat saat itu berada di Okinawa dan Filipina. Kemudian Amerika Serikat mencoba membendung pasukan Korea Utara hanya dengan kekuatan udara dan laut. Douglas MacArthur, panglima tertinggi AS di Timur Jauh, menegaskan dibutuhkannya pasukan darat untuk menekan pasukan musuh. Selanjutnya Amerika Serikat mengirim divisi dari Jepang ke Korea di bawah naungan PBB.

Peperangan Semenanjung Korea berlangsung selama kurun waktu 3 tahun(1950-1953).Berakhirnya perang ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan gencatan senjata di Pamunjom pada 27 Juli 1953²⁸. Ketentuan garis lintang 38 derajat diputuskan bahwa garis ini adalah garis pemisah antara blok komunis dan blok nonkomunis. Pada bulan Agustus, Amerika Serikat menandatangani pakta keamanan bersama dengan Korea Selatan untuk mengantisipasi potensi serangan lain. Sehingga gencatan senjata antara dua negara Korea Utara dan Korea Selatan ini ciptakan sebagai bentuk dari pemulihan perdamaian di Asia.

Intervensi Amerika Serikat merambah dalam perang saudara Vietnam yang secara resmi dimulai

²⁸New York Times."Truce is Signed,Ending the Fighting in Korea"
Dikutip dari <http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0727.html>, diakses pada 15 December 2017

pada 8 Maret 1965. Tidak dapat dielakkan dari kepemimpinan pemerintahan Harry Truman hingga Richard Nixon, Amerika Serikat terus memperdalam keterlibatannya di Vietnam. Keputusan Amerika Serikat untuk membantu Vietnam Selatan merupakan bentuk upaya pembendungan Komunisme dari wilayah Vietnam Utara. Perang ini merupakan perang terpanjang dalam sejarah karena berlangsung selama 12 tahun. Namun sebenarnya, dibalik konflik ini adalah bagian dari *proxy war* antara kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam persaingan politik dan ideologi. Diawali dengan pihak Vietnam Utara merasa dirugikan atas ikut campur tangan Amerika Serikat sehingga memutuskan meminta bantuan dari Russia.

Amerika Serikat bersama Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Filipina, Pakistan, dan Thailand pada bulan September 1954 menandatangani sebuah perjanjian yang membentuk Organisasi Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) dalam rangka mempertahankan wilayah Pasifik Selatan.²⁹ Hal ini merupakan kesepakatan tentang tindakan bersama untuk melakukan serangan terhadap negara yang dianggap sebagai ancaman bagi semua pihak sesuai dengan proses konstitusional. Dalam tujuan yang spesifik SEATO merupakan jaminan AS untuk pertahanan Vietnam Selatan dimana ini memberikan dasar hukum untuk intervensi sepihak untuk mempertahankan garis pemisah antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara.

. Puncak peperangan ini terjadi pada tahun 1968 ketika pasukan gabungan selatan dengan berkekuatan 1,200.000 pasukan militer menggempur kubu utara yang hanya berjumlah 520.000 pasukan. Namun gabungan tentara Vietnam selatan dan AS ini cukup terkejut

²⁹ Joe M. Palmer. 1966. *SEATO Reexamine*: Pennsylvania: USAWC Research Element, hal 91

karena medan yang harus mereka lewati merupakan hutan buas yang berlumpur dan berawa. Serta medan pegunungan yang mereka sama sekali tidak kuasai. Kondisi ini dimanfaatkan tentara persekutuan Vietnam utara untuk mengalahkan kubu selatan. Ditengarai kubu selatan yang terus mengalami kekalahan akhirnya pada tanggal 27 februari 1973 dengan menyerahnya Amerika Serikat, maka disepakati perjanjian damai. Pasca perang berakhir diadakanlah persetujuan antara dua pihak kubu selatan dan utara untuk bersatu membentuk satu negara yg berideologikan komunis.

D. Kebijakan Krisis Nuklir Cuba

Perang Dingin mencapai puncaknya pada peristiwa Krisis Misil Kuba yang terjadi pada tanggal 15-28 Oktober 1962, dimana konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyangkut pengembangan misil oleh Soviet di Kuba. Krisis ini merupakan peristiwa paling ditakutkan oleh banyak pihak pada masa itu terkait adanya potensi perang Nuklir. Dalam studi Hubungan Internasional, krisis nuklir Kuba ini sering dihadapkan dengan konsep kehancuran bersama (Mutual Assured Destruction). Berawal setelah terungkapnya fakta bahwa Amerika Serikat melakukan serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet, sebagai pemimpin komunis dunia, maupun rakyat Kuba sendiri.

Pada tanggal 7 September, Uni Soviet memasok senjata defensif ke Kuba. Pengiriman pertama rudal R-12 tiba pada malam tanggal 8 September dan diikuti oleh yang rudal kedua pada September 16. Uni Soviet pada saat itu sedang membangun enam rudal R-12 medium-range dengan jangkauan efektif 2,000 kilometer dan 3 situs menengah rudal balistik bintang tiga R-14 dengan jangkauan maksimum 4.500 kilometer.³⁰ Amerika Serikat kemudian mendapatkan bukti-

³⁰Mezhoud Hanane.2010.*The American Intervention in The Cuban Missile Crisis of 1962*.Faculty of Political Science University of Mentouri Constantin.

bukti foto mengenai pemasangan instalasi misil Uni Soviet di Kuba tersebut, dan hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan Amerika Serikat. Menanggapi kejadian tersebut Presiden Kennedy memutuskan untuk melakukan blokade laut yang bertujuan untuk menghentikan pengiriman material dari Soviet yang digunakan untuk membangun instalasi di Kuba.

Pada tanggal 26 Oktober Khrushchev mengirim telegram terhadap Kennedy di mana ia akan membongkar kembali pemasangan rudal jika Kennedy sepakat untuk menghentikan blokade dan menjanjikan non-invasi Kuba. Kennedy menyetujui persyaratan tersebut melalui surat rahasia. Negosiasi pun tentunya berjalan alot karena baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet memiliki persyaratan dan keinginan masing-masing yang diajukan agar krisis dapat segera diakhiri. Setelah melewati proses diplomasi yang panjang, konfrontasi ini berakhir dengan bantuan Sekretaris Jendral United Nations pada 28 Oktober 1962. Dalam kesepakatannya, Uni Soviet berkomitmen untuk menarik mundur persenjataan misilnya dari Kuba dan Amerika Serikat mendeklarasikan secara publik pernyataan untuk tidak menginvasi Kuba. Di samping dua poin ini, Amerika Serikat juga pada akhirnya menarik kembali hulu ledak nuklirnya di Turki dan Italia.

E. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara era Kim Jong Un

Berbagai perundingan baik secara bilateral maupun multilateral telah diupayakan Amerika Serikat untuk melunakan sikap Korea Utara terkait program pengembangan nuklirnya. Negosiasi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara mengalami pasang surut dalam pembicaraannya. Serangkaian perundingan *Government to Government* dilaksanakan antara kedua pihak. Pada era Pemerintahan Obama tercatat telah melakukan beberapa dialog langsung dengan Korea Utara dengan menggunakan prinsip "*Strategis*

Patience". Kebijakan "*Strategis Patience*", merupakan kebijakan yang menyarankan Amerika Serikat untuk bisa menunggu Korea Utara agar membuat keputusan denuklirisasi. Dimana pada pertemuan ketiga bilateral AS-Korea Utara akhirnya menghasilkan laporan yang disepakati kedua pihak yaitu "*Leap Day Agreement*."

Pada tanggal 29 Februari 2012, Amerika Serikat dan Korea Utara mengumumkan sebuah kesepakatan "*Leap Day Agreement*" bahwa AS akan memberikan bantuan pangan yang substansial sebagai imbalan bagi Korea Utara untuk menyetujui penghentian pengayaan uranium dan pengujian rudal dan kembalinya pemantauan IAEA ke Yongbyon, yang mengarah pada dimulainya kembali *Six Party Talks*. Dimana *Six Party Talks* digunakan AS sebagai wadah mediasi melalui perundingan yang melibatkan China, Korea Utara dan Selatan, Jepang, dan Rusia dalam upaya denuklirisasi tersebut.³¹

Amerika Serikat telah siap untuk mengeluarkan program bantuan pangan untuk Korea Utara dengan memberikan 240.000 ton bantuan nutrisi dan prospek bantuan tambahan berdasarkan kebutuhan yang terus berlanjut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah Korea Utara melakukan tindakan provokatif seperti uji coba nuklir dan rudal serta mengamankan komitmen Korea Utara untuk kembali ke jalan denuklirisasi. Namun kesepakatan itu gagal dikarenakan 3 minggu kemudian, pada 16 Maret 2012, Korea Utara menyampaikan pengumuman peluncuran satelit pada 12 April 2012. Tindakan tersebut menimbulkan kecaman internasional terlebih dari Amerika Serikat dan negara-negara *Six Party Talks*. Di susul keberhasilan peledakan nuklir Kim Jong Un pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan daya ledak sebesar 7 kilo ton menambah tanda jelas bahwa usaha perundingan- perundingan tersebut gagal.

³¹Council on foreign relations. "*The Six Party Talks on North Korea's Nuclear Program*" dikutip dari <https://www.cfr.org/background/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program>. XX
Diakses pada 23 Desember 2017

Sikap pembangkangan Korea Utara tersebut menambah sanksi-sanksi keras yang di luncurkan Amerika Serikat baik langsung ataupun melalui PBB. Tahun 2013 Departemen Keuangan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Daedong Credit Bank. Perbankan ini dianggap ikut menyokong program senjata pemusnah massal yang dikembangkan pemerintahan Kim Jong Un. Amerika Serikat juga menerapkan langkah serupa kepada Foreign Trade Bank (FTB) Korea Utara, bank devisa utama di negara itu. Dengan melarang FTB dari transaksi internasional. Sejalan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB, yang dipimpin terutama oleh Amerika Serikat, mengeluarkan sebuah babak baru sanksi pada bulan Maret 2013 yang memberlakukan pembatasan besar pada perbankan, perjalanan, dan perdagangan Korea Utara. Sanksi-sanksi ekonomi ini ditujukan untuk menutup akses pendanaan kepada Pyongyang.

Sampai dengan tahun 2015 Presiden A.S. Barack Obama masih membuka upaya negosiasi dengan Korea Utara . Dimana Korea Utara menginginkan pencabutan sanksi-sanksi ekonomi, namun AS memberikan syarat Korea Utara harus membuktikan bahwa benar-benar ingin meninggalkan program senjata nuklirnya. Namun terulang kembali uji coba nuklir Korea Utara pada bulan Januari 2016 dan peluncuran satelit pada bulan Februari 2016. Sehingga para pembuat kebijakan AS menyadari betapa tidak berhasilnya usaha diplomatik mereka selama tahun-tahun sebelumnya.

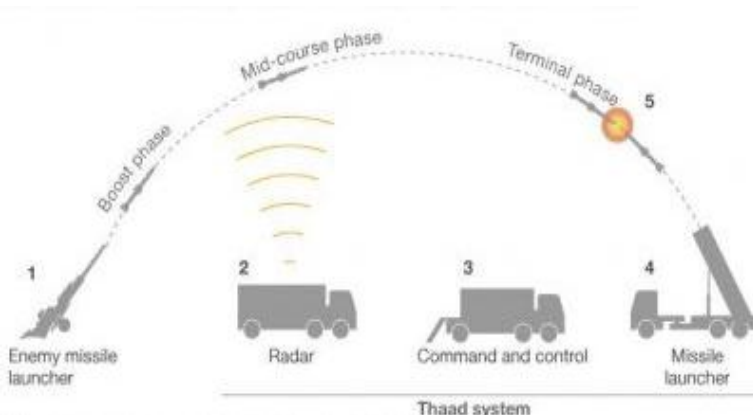
Sikap Korea Utara yang kerap membangkang dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati membuat penyelesaian isu ini tidak pernah mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 2016 Obama memberlakukan pembekuan berbagai properti Korea Utara di AS, melarang ekspor Amerika Serikat, serta melarang investasi perusahaan-perusahaan AS di Korea

Utara.³² Perintah ini memperluas kewenangan untuk mendaftarkan siapapun termasuk non-warga AS yang berurusan dengan Korea Utara.

Pada Era Presiden Trump, tanggal 7 Maret 2017 Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka mulai memasang sistem pertahanan rudal di Korea Selatan yaitu *Terminal High-Altitude Area Defense system*. Pemasangan ini dilakukan setelah Korea Utara kembali melanggar sanksi internasional dengan meluncurkan 4 rudal balistik pada 6 Maret 2017. THAAD difungsikan untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Sistem kerja THAAD ini melalui penembakan rudal daya jangkauan rendah atau sedang yang sedang mengudara.

Sejumlah 6 yang membawa bagian-bagian THAAD (*Terminal High-Altitude Area Defense*) tiba di di Seongju sekitar 250 km di sebelah selatan Seoul.³³ Walaupun pemasangan ini menimbulkan reaksi keras dari China dan Russia namun sistem pertahanan THAAD dibangun sepenuhnya sampai Desember 2017. Kebijakan ini di respon oleh Korea Utara dengan penempatan pasukan artileri di wilayah perbatasan yang hanya berjarak 56 kilometer dari Seoul.

Gambar 2.1
Sistem Kerja Alat Penahanan Rudal THAAD



Sumber: Federation of American Scientists, US Department of Defence

Cara kerja sistem THAAD:

- 1) Musuh meluncurkan rudal
- 2) Sistem radar THAAD mendeteksi peluncuran, yang diteruskan ke perintah dan kontrol
- 3) Perintah dan kontrol THAAD menginstruksikan peluncuran rudal pencegat
- 4) Rudal pencegat ditembakkan ke proyektil musuh
- 5) Proyektor musuh hancur dalam fase terminal penerbangan

Kebijakan di bidang ekonomi, yakni Presiden Donald Trump terus menambah sanksi terhadap Korea Utara. Upaya ini difungsikan memperbesar tekanan ekonomi agar semakin membebani Korea Utara hingga negara tersebut menghentikan program nuklirnya. Pada bulan September 2017 Trump mengeluarkan perintah eksekutif baru secara signifikan yaitu memperluas wewenang Amerika Serikat dengan menyasar perusahaan perorangan, lembaga keuangan yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan Korea Utara guna memberikan tekanan maksimal. Tekanan dilakukan dengan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara.³⁴ Menteri Keuangan A.S. Steven Mnuchin mengatakan bahwa bank-bank yang melakukan bisnis di Korea Utara tidak akan diizinkan untuk juga beroperasi di Amerika Serikat.

Walaupun sebenarnya tensi antara Amerika Serikat dan Korea Utara semakin memanas. Namun, Hingga bulan September 2017 upaya negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dengan rezim Korea Utara terus berlangsung di belakang layar. Melalui negosiator Amerika Serikat, Joseph Yun telah melakukan operasi diplomasi terselubung dengan mendekati utusan pemerintah Korea Utara di PBB di kota New York. Amerika Serikat meminta agar uji coba nuklir dan

³⁴CNN Indonesia. "Trump Tambah Baru Tekan Ekonomi". Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170922033356-134-243232/trump-tambah-sanksi-baru-tekan-ekonomi-korea-utara>. diakses pada 24 Desember 2017

peluncuran rudal dihentikan terlebih dahulu. Joseph Yun melakukan strategi yang disebut “Jalur New York” untuk menembus kebuntuan yang terjadi antara Presiden Donald Trump dengan pemimpin Kim Jong Un. Ditambah Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menegaskan kebijakan diplomasi dalam upaya perlucutan senjata nuklir Korea Utara ini akan terus hingga terwujud kesepakatan antara dua belah pihak.